

Kinerja Penyaluran BAZIS DKI Jakarta Berdasarkan Indeks CIBEST



Dr Irfan Syaqui Beik
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB



Qonita
Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Zakat merupakan instrumen penting dalam perekonomian Islam karena memiliki fungsi dan tujuan yang sangat mulia. Secara ruhiyah perintah zakat memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap kondisi kejiwaan seseorang karena ia merupakan alat untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Secara ekonomi, zakat dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperbaiki taraf hidup kelompok dhuafa yang masuk dalam kategori mustahik atau kelompok yang berhak menerima zakat. Zakat dapat digunakan mustahik untuk kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah ekonomi pada kehidupan mereka. Selain itu, para mustahik juga dapat memanfaatkannya untuk kegiatan konsumsi sehari-hari demi memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, sandang, papan, dan lain-lain.

Bazis Provinsi DKI Jakarta merupakan badan amal zakat pemerintah pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 5 Desember 1968. Bantuan yang mereka berikan kepada para mustahik dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan produktif ini kemudian dikembangkan dalam dua bentuk program, yaitu program pendidikan dan program pemberian modal usaha. Dana zakat yang digunakan untuk pendidikan dialokasikan untuk para pelajar dan mahasiswa dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Sedangkan untuk yang berbentuk modal usaha, BAZIS DKI Jakarta bekerjasama dengan sejumlah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) untuk pendistribusiannya.

Jika dilihat dari jumlah penghimpunan, pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun enam tahun terakhir, dana ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh BAZIS DKI Jakarta mencapai angka Rp 44,2 miliar pada tahun 2009, Rp 52,7 miliar tahun 2010, Rp 64,7 miliar tahun 2011, Rp 81,4 miliar tahun 2012, Rp 97,7 Miliar tahun 2013, dan Rp 113,7 miliar tahun 2014. Dana yang telah dihimpun tersebut kemudian disalurkan dan di dayagunakan hanya bagi enam ashnaf saja, yaitu fakir, miskin, muallaf, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Tidak ada alokasi dana untuk riqab (pembebasan budak) karena di Indonesia tidak dikenal adanya perbudakan, sedangkan hak amal tidak diambil dari dana ZIS, melainkan dari subsidi APBD Pemerintah DKI Jakarta.

Namun bertolak belakang dengan peningkatan dana ZIS tersebut, jumlah penduduk miskin di kota Jakarta justru cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari tahun 2009 hingga tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami peningkatan dari 323.300 jiwa menjadi 393.980 jiwa. Begitu juga dengan ketimpangan pendapatan penduduknya yang meningkat berdasarkan peningkatan pada nilai indeks Gini kota Jakarta.

Bahkan pada tahun 2013, nilai indeks Gini kota Jakarta menduduki peringkat keempat tertinggi di Indonesia setelah Papua, DI Yogyakarta dan Gorontalo. Nilai indeks Gini Jakarta tahun tersebut mencapai angka 0.433. Dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka skor ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks Gini Indonesia. Untuk itu pe-



nelitian ini mencoba menguji apakah BAZIS DKI Jakarta turut berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan, atau justru malah mengurangi kemiskinan sehingga penyebab naiknya angka kemiskinan tersebut adalah variabel di luar zakat.

Hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat, Infaq, Sadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, dengan mengambil sampel responden yang berasal dari rumah tangga penerima manfaat program BAZIS DKI Jakarta. Responden dalam penelitian ini berada di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu dari bulan Maret 2015 hingga April 2015.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pemberian kuisioner dan wawancara langsung terhadap 100 rumah tangga mustahik yang menerima zakat dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Selain data primer, data sekunder juga digunakan untuk melengkapi data primer yang ada.

Penelitian ini menggunakan model CIBEST sebagai alat ukurnya. Model CIBEST ini dibuat oleh Beik dan Arsyianti (2014), dimana keduanya mengelompokkan rumah tangga atau keluarga ke dalam empat kelompok. Kelompok pertama (kuadran I) adalah kelompok sejahtera, dimana rumah tangga yang berada pada kuadran ini mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik. Sehingga, pendapatan mereka berada di atas garis kemiskinan material dan skor spiritual mereka berada di atas garis kemiskinan spiritual.

Kelompok kedua (kuadran II) adalah kelompok rumah tangga yang hanya mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan baik, sementara kebutuhan materialnya tidak tercukupi dengan baik. Inilah yang disebut dengan kuadran kemiskinan material. Sedangkan kelompok ketiga (kuadran III) adalah kebalikan dari kelompok kedua, dimana rumah tangga pada kuadran ini hanya

Indeks CIBEST	Tanpa zakat	Dengan zakat	Perubahan (%)
W	0.51	0.61	19.61
Pm	0.47	0.39	-17.02
Ps	0	0	0
Pa	0.02	0	-100
SS	4.09	4.17	1.96

TABEL 1
Nilai Indeks CIBEST Dengan dan Tanpa Zakat Indeks CIBEST

mampu memenuhi kebutuhan materialnya dengan baik dan tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan baik. Inilah yang disebut dengan kemiskinan spiritual. Dan yang terakhir, kelompok keempat (kuadran IV) adalah kelompok dimana rumah tangga yang ada tidak mampu memenuhi kedua kebutuhan ini dengan baik, apakah itu kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Inilah yang disebut dengan kuadran kemiskinan absolut.

Dari hasil kajian lapang yang dilakukan, diketahui bahwa besarnya rata-rata pendapatan / pengeluaran rumah tangga yang menjadi responden dalam penelitian ini mencapai angka Rp 2,46 juta tanpa adanya zakat. Dengan adanya zakat, maka angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 2,76 juta. Ini menunjukkan bahwa keberadaan zakat mampu menaikkan pendapatan rata-rata para mustahik.

Dari sisi spiritual, skor spiritual responden juga meningkat dengan adanya program zakat. Peningkatan tersebut mencapai angka sebesar 1.96 persen, dari 4.09 menjadi 4.17. Hasil ini menunjukkan bahwa Bazis DKI Jakarta dalam proses menetapkan mustahik sebagai penerima ZIS, lebih memilih mustahik yang kondisi spiritualnya telah baik, dibandingkan dengan mereka yang kondisi spiritualnya

kurang baik. Hanya dua responden saja yang skor spiritualnya berada di bawah garis kemiskinan spiritual. Sehingga, pasca penyaluran zakat, skor spiritual keseluruhan responden hanya naik tipis kurang dari dua persen.

Selanjutnya, dari analisis berdasarkan indeks CIBEST diketahui bahwa tingkat kesejahteraan mustahik mengalami kenaikan sebesar 19.61 persen. Hal ini dapat dilihat dari perubahan nilai indeks kesejahteraan dari 0.51 menjadi 0.61 dengan adanya zakat yang disalurkan. Sedangkan dari sisi kemiskinan material, terjadi penurunan nilai indeks kemiskinan material sebesar 17.02 persen, dari 0.47 menjadi 0.39. Secara spiritual, indeks kemiskinan spiritual tidak mengalami perubahan, yaitu tetap nol dikarenakan mustahik BAZIS DKI Jakarta tidak ada yang masuk dalam kelompok berpendapatan tinggi dan memiliki skor spiritual rendah. Yang ada adalah mereka yang skor spiritualnya rendah namun secara material juga miskin, sehingga masuk dalam kategori miskin absolut.

Yang menarik, ternyata indeks kemiskinan absolut ini dapat dikurangi 100 persen dengan adanya program zakat. Ini menunjukkan bahwa program BAZIS DKI Jakarta terbukti mampu mengurangi secara signifikan mereka yang berada dalam kategori miskin absolut. Wallahu a'lam. ■

TSAQOFI

Ekonomi Syariah, Ekonomi Berjamaah



Dr Irfan Syaqui Beik
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu konsep dalam ekonomi syariah yang perlu untuk terus dikembangkan adalah konsep ekonomi berjamaah. Konsep ini menitikberatkan pada bagaimana mengembangkan kekuatan ekonomi umat melalui pengorganisasian semua potensi yang ada dalam barisan yang terkoordinasikan dan terkonsolidasikan dengan baik. Dengan kata lain, bagaimana seluruh komponen umat ini berjamaah dalam membangun kekuatan ekonominya.

Sejarah telah membuktikan bahwa melalui kekuatan berjamaah, maka banyak persoalan ekonomi yang bisa diatasi. Tidak hanya itu, umat Islam pun mampu menjadi umat yang menguasai ekonomi dunia selama berabad-abad dengan konsep berjamaah ini. Bahkan di zaman Nabi, ketika beliau hijrah ke Madinah bersama para sahabat Muhajirin, maka kekuatan kedua yang beliau bangun setelah membangun mesjid adalah membangun pasar.

Pasar dimana umat Islam saat itu bahu membahu dalam mengembangkannya. Pasar dimana pilar atau pondasi utamanya adalah kekuatan berjamaah.

Semangat berjamaah dalam segala hal termasuk dalam berekonomi inilah yang menurut hemat penulis harus kita bangkitkan saat ini. Bagaimana antar komponen umat bisa

saling bersinergi dalam mengembankan tiga pilar perekonomian yang ada, yaitu sektor riil, sektor keuangan dan sektor zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Ada banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan mengembangkan konsep *crowd funding* dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini pada hakikatnya menggambarkan komitmen berjamaah dalam berekonomi pada tingkatan yang paling sederhana, yaitu melalui pengumpulan dana untuk kepentingan ekonomi umat.

Dalam bahasa yang paling sederhana, *crowd fund* ini dapat diartikan sebagai dana recek, yang dihimpun dari banyak orang, dan diorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur melalui konsep patungan usahanya, yang berujung pada pembangunan Hotel Siti di Tangerang, adalah salah satu bentuk *crowd fund*. Beliau menghimpun dana yang tidak terlalu besar per individunya, namun diolah dan dikelola dengan baik, serta diinvestasikan pada industri properti (hotel).

Yang menjadi kunci keberhasilan model *crowd fund* seperti ini antara lain ditentukan oleh jumlah pihak yang terlibat. Ketika yang mengikuti program ini jumlahnya mencapai seribu orang, maka dana Rp 100 ribu/bulan/orang akan menjadi kekuatan

yang luar biasa karena akan menghasilkan angka Rp 100 juta/bulan. Jumlah pihak yang berpartisipasi inilah yang menjadi faktor pengali yang luar biasa. Jika faktor pengalinya menjadi 1 juta orang, maka dana yang terhimpun menjadi Rp 100 miliar/bulan.

Dengan konsep *crowd fund* ini, maka berapapun besarnya kebutuhan pendanaan bagi pembangunan ekonomi umat dan bangsa, maka akan dapat dipenuhi dengan baik. Tinggal bagaimana sekarang upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa dengan berjamaah, maka kekuatan perekonomian bangsa ini akan dapat dibangkitkan dengan mudah. Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah langkah strategis dalam mengembangkan *crowd fund* ini sehingga ia dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang efektif.

Pertama, perlunya melakukan edukasi yang berkesinambungan dan masif, sehingga publik menjadi tersadarkan akan potensi yang dimilikinya. Pepatah yang mengatakan "sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit" harus terus menerus digemakan kepada umat untuk mendorong tingkat partisipasi mereka yang lebih besar.

Kedua, perlu dibangun kelembagaan kuat yang akan menjadi payung dari upaya pengumpulan dana recek atau *crowd fund* ini. jika melihat ka-

rakternya, maka *crowd fund* ini dapat dimanfaatkan untuk mencapai dua tujuan. Yaitu, tujuan sosial dan pemberdayaan kaum dhuafa, dan tujuan yang bersifat produktif dan investasi. Untuk tujuan pertama, maka keberadaan Baznas, LAZ dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dapat dioptimalkan sebagai payung bersama *crowd funding* dalam bentuk Ziswaf, apalagi dari sisi legal kita telah memiliki UU terkait zakat dan wakaf. Sedangkan untuk tujuan kedua, maka pola seperti patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur bisa menjadi *role model* yang dapat dijadikan sebagai referensi.

Ketiga, perlu dibuat aturan hukum yang dapat menjamin bahwa pola pengembangan *crowd fund*, terutama untuk tujuan investasi, dapat dilakukan dengan baik dan aman dari sisi regulasi. Ini untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran yang nantinya akan merugikan masyarakat. Bagi pemerintah, maka gagasan *crowd fund* ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk memobilisasi dana masyarakat untuk pembangunan.

Bukankah sukuk negara ritel yang sekarang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan salah satu bentuk *crowd funding* yang diintegrasikan dengan pasar keuangan? Wallahu a'lam. ■

DETERMINAN NPF

Bank Umum Syariah di Indonesia



Sedy Watazawadu 'Ilmi
Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Sahara
Dosen IE - FEM IPB

Kegiatan bank umum dalam menyalurkan atau meminjamkan uang selalu dihadapkan pada risiko. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko kredit atau dalam industri perbankan syariah dikenal sebagai risiko pembiayaan atau *Non Performing Financing* (NPF). Besar rasio NPF yang melebihi 5 persen menggambarkan kinerja keuangan bank yang memburuk. Kinerja perbankan syariah terus mengalami peningkatan dibandingkan sejak pertama kali berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun, total pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah (BUS) meningkat dari Rp 68,18 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 199,33 triliun pada tahun 2014. Rata-rata peningkatan pada pembiayaan oleh bank syariah per tahunnya adalah 38,47 persen.

Di sisi lain, rasio *Non Performing Financing* pada bank umum syariah (BUS) selalu mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang terjadi bahkan pernah mencapai angka yang melebihi batas ketentuan Bank Indonesia yaitu pada triwulan pertama dan ketiga tahun 2009 sebesar 5,14 persen dan 5,72 persen. Meskipun nilai NPF perbankan syariah pada periode tahun 2010 sampai dengan 2013 mengalami fluktuasi dibawah 5 persen.

Namun pada tahun 2014 NPF mulai meningkat kembali secara signifikan dan hampir mencapai 5 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* antara pertumbuhan pembiayaan BUS dengan tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan.

NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF adalah salah satu ancaman bagi bank karena dapat mengurangi modal bank secara cepat sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar.

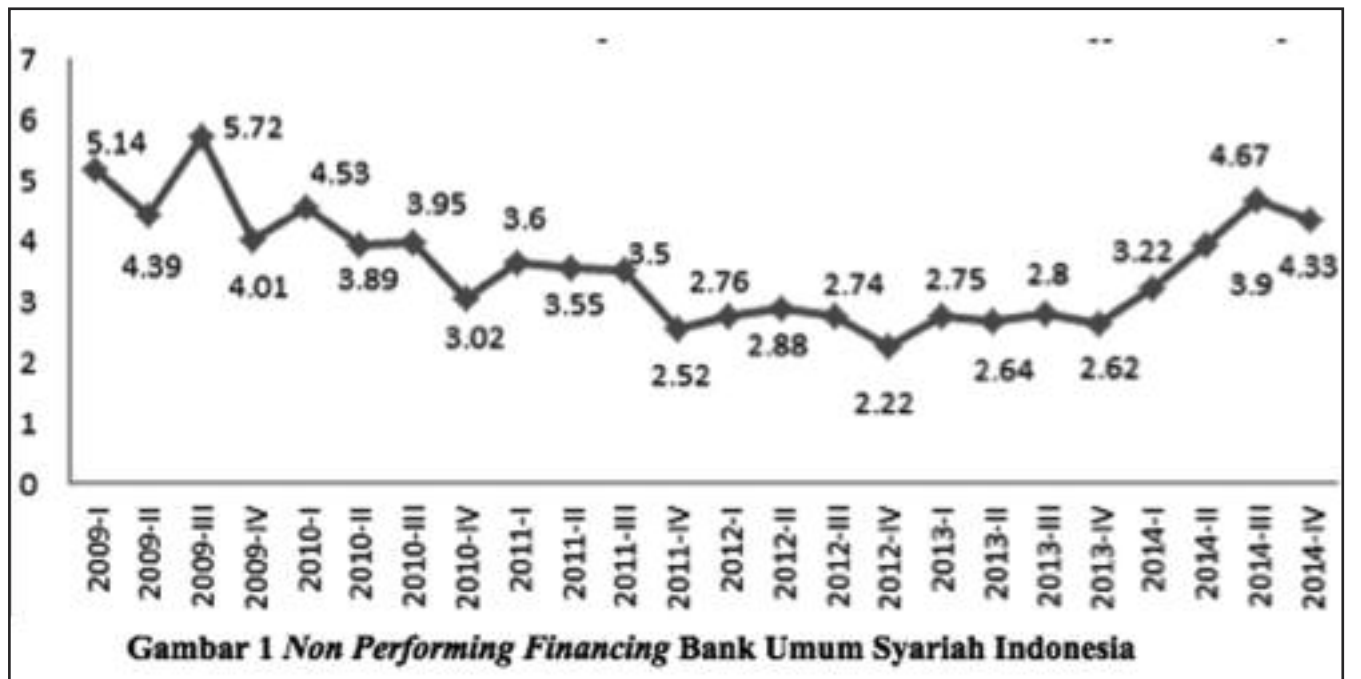
Adanya pembiayaan yang bermasalah tersebut akan mengakibatkan penurunan pendapatan bank, penurunan tingkat bagi hasil kepada pemilik dana, bahkan dapat berdampak pada turunnya kepercayaan nasabah.

Pembayaran macet dalam jumlah yang relatif besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai pembiayaan macet yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah penanggulangan, maka akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya rush.

Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi *Non Performing Financing* pada bank umum syariah ditinjau dari faktor internal bank maupun faktor eksternal bank.

Metodologi dan hasil penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS), SEKI BI, BPS dan laporan GCG Bank Umum Syariah (BUS) mulai kuartal I tahun 2007 sampai dengan kuartal IV tahun 2014. Penelitian ini menggunakan 11 Bank Umum Syariah yang tercatat hingga tahun 2014. Alat analisis menggunakan analisis panel statis dengan pendekatan *unbalanced panel data*. *Unbalanced Panel Data* meru-



Gambar 1 Non Performing Financing Bank Umum Syariah Indonesia

pakan struktur data panel yang mengandung *missing values* pada unsur deret waktunya. Penggunaan alat analisis ini dikarenakan jumlah BUS yang berbeda pada tahun 2009 yaitu hanya 6 BUS dan tahun 2010 terdapat 11 BUS sehingga terdapat perbedaan observasi.

Hasil penelitian menggunakan model *Random Effect* menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, nilai komposit GCG, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan ROA (*Return on Assets*) yang secara nyata berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah.

Di sisi lain, tingkat pengangguran, total aset dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap NPF pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil estimasi, pertumbuhan kenaikan 1 persen GDP akan menurunkan tingkat NPF sebesar 0,35 persen. Kenaikan GDP akan semakin meningkatkan kemampuan bayar masyarakat karena pendapatan riil yang juga meningkat.

Sebaliknya, jika terjadi resesi pada pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh penurunan GDP, akan memberikan dampak bagi masyarakat dengan menurunnya kemampuan daya beli. Hal ini juga akan berdampak pada penurunan kemampuan masyarakat untuk membayar kewajiban mereka kepada bank.

Pada sisi makroekonomi, inflasi juga memberikan dampak pada tingkat NPF. Peningkatan 1 persen pada inflasi akan meningkatkan NPF sebesar 0,14 persen. Hal ini dikarenakan ketika terjadi inflasi, masyarakat akan mengalami penurunan daya beli yang diakibatkan adanya penurunan pendapatan riil masyarakat, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengembalikan pembiayaan.

Ditinjau dari sisi manajemen internal bank, terdapat sebuah sistem yang terintegrasi antara seluruh *stakeholder* dalam mengelola kegiatan perbankan, yaitu *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hasil estimasi, peningkatan pada nilai komposit GCG akan meningkatkan NPF 1,326 persen.

Kualitas penerapan GCG yang dilihat berdasarkan nilai komposit memiliki kriteria bahwa semakin besar nilai kompositnya, kualitas

Tabel 1 Hasil Estimasi Regresi Panel (*Random Effect Model*)

Variable	Coefficient
Pertumbuhan GDP	-0.347**
Inflasi	0.142**
Pengangguran	0.144
Good Corporate Governance (GCG)	1.326***
Total Aset	0.019
Capital Adequacy Ratio (CAR)	-0.008*
Finance to Deposit Ratio (FDR)	0.001
Return on Asset (ROA)	-0.114*

*** Signifikan pada taraf nyata 1%
** Signifikan pada taraf nyata 5%
* Signifikan pada taraf nyata 10%

”Pembayaran macet dalam jumlah yang relatif besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai pembiayaan macet yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah penanggulangan, maka akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya rush.”

penerapan GCG semakin buruk. Komponen penilaian GCG berdasarkan pada kinerja dewan komisaris, direksi, komite, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

CAR merupakan salah satu rasio kinerja keuangan yang menggambarkan kecukupan modal dalam menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen CAR memiliki mengurangi rasio NPF 0.008 persen. Peningkatan pada CAR menunjukkan peningkatan jumlah modal yang dimiliki bank untuk mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan.

Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen ROA akan menurunkan NPF 0.114 persen.

Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Peningkatan pada ROA akan menurunkan tingkat NPF sebab profit yang diterima bank merupakan gambaran kinerja bank yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.

Dari hasil di atas, Bank Umum Syariah maupun pemerintah perlu melakukan pengawasan rutin terhadap kinerja internal bank maupun kinerja makroekonomi yang dapat memengaruhi rasio NPF.

BUS diharapkan mampu mengontrol kinerja keuangannya sendiri sebab kinerja internal adalah faktor yang dapat dikendalikan langsung oleh BUS. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya *stakeholder* BUS mulai dari dewan komisaris hingga nasabah untuk selalu berupaya menurunkan tingkat NPF. *Wallahu'alam*. ■

BUKAN TAFSIR



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



Dr M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Memandang Harta

Kita masih akan mengulas bahasan yang sama dengan bulan lalu tentang Qarun (karun) dan Nabi Sulaiman AS. Dua manusia yang termaktub dalam kitab suci yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Mendengar dua sosok ini, analogi kita merujuk bahwa si Qarun adalah konglomerat angkuh, kikir, dan tak pandai bersyukur, dan Nabi Sulaiman AS sang raja kaya yang rendah hati dan dermawan.

Qarun adalah konglomerat umat Nabi Musa yang tiada bandingan di zamannya. Saking kayanya, sampai kunci-kunci gundang penyimpanan hartanya mesti dipikul oleh orang-orang yang kuat (QS 28: 76). Ini baru kunci gundangnya, belum harta di dalamnya.

Begitu pun Nabi Sulaiman AS adalah adalah raja yang sangat kaya dengan wilayah kekuasaan yang terbentang luas. Beberapa pihak memperkirakan harta orang terkaya di dunia saat ini mungkin tak lebih dari serpersepuh kekayaan Nabi Sulaiman AS. Inipun baru prediksi dari keterangan yang dinyatakan dalam manuskrip-manuskrip

agama samawi.

Sebagai konglomerat, tentu ada persamaan yang bisa dilihat dari keduanya. Orang yang mampu mengumpulkan harta sebanyak itu pastilah dianugerahi ilmu (*financial literacy*) dan kecakapan yang mumpuni yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan dan mengakumulasi banyak harta. Mereka adalah orang yang memiliki kepedaiaan berbisnis di atas rata-rata dalam berdagang, berinvestasi, atau mengelola harta. Ilmu pengetahuan memang salah satu syarat kunci memperoleh keutamaan di dunia akhirat.

Namun perbedaan di antara keduanya adalah terkait pandangan dan penyikapannya mereka terhadap harta. Qarun dikenal sebagai pribadi yang angkuh yang di antaranya tercermin dari pernyataannya bahwa harta yang ia peroleh hanyalah karena ilmu (kepedaiaan berbisnis) dan jerih payahnya (QS 28:78). Ia pun merasa bahwa kekayaan yang dimilikinya karena begitu besarnya kecintaan Allah kepadanya, melebihi manusia lain.

Sikap tersebut kemudian membentuk sikap kikir, egois,

melupakan jasa orang lain (termasuk karyawan dan kaum miskin), bermegah-megahan dan enggan mendengar masukan orang lain. Karenanya, Qarun merasa bebas saja menggunakan harta sekehendak hatinya tidak terikat oleh kewajiban sosial seperti zakat, infaq atau sedekah kepada fakir miskin dan kaum mustadh'afin.

Seperti itulah salah pikir Qarun tentang harta. Bukan mendatangkan manfaat sebagai sarana berbuat kebaikan, kekayaan justru malah menjadi musibah bagi dirinya. Tak hanya diri dan kekayaannya, nama Qarun sejatinya tenggelam (ditenggelamkan) ke dalam bumi.

Adapun Nabi Sulaiman AS, ketika ditanya perihal kekayaannya beliau menyatakan semuanya hanyalah sebagai karunia Tuhannya. Kekayaan justru ujian besar bagi dirinya apakah ia bisa bersyukur atau mengingkari nikmat Tuhan (QS 27:40). Kerendahan hati Nabi Sulaiman AS juga ditunjukkan dengan kepasrahannya dan doa yang selalu dipanjatkannya, takut beliau tak bisa bersyukur.

Alhasil, 'harta karun' sejati bagi kita adalah bagaimana bagaimana kita bisa meraih pelajaran (hikmah) dari kejadian yang menimpa Qarun dan Nabi Sulaiman AS. Materi boleh melekat (atau tidak melekat) namun hati tak boleh bersikap materialistis. Materi boleh ditempatkan dalam raga namun tak boleh menetap dalam hati. Kita mesti memaknai materi melampaui wujudnya, menuju makna transendennya.

Dari dua model di atas, kita tentu tak ingin seperti Qarun, namun inginnya meneladani Nabi Sulaiman A.S. Pelajaran dari Qarun adalah tentang model manusia pencinta dunia (*hubb al-dunya*) yang mengumpulkan kekayaan, berbuat dzalim dengan hartanya, takabbur dengan kekayaannya, dan abai akan kewajiban sosial. Cinta dunia berlebihan memang biang sumber keburukan.

Karakter bertendensi dunia-wi ini juga mengangap rasionalitas kekayaan hanya sebatas materi saja. Cinta dunia abai akan kewajibannya ketika memperoleh harta (misalnya

lupa shalat ketika bekerja, atau bertransaksi ribawi), maupun lalai ketika telah meraih rezeki (tidak peka sosial). Inilah sebagian karakter-karakter Qarun masa kini, *na'udzu billah*.

Padaahal, 'harta' dalam bahasa al-Qur'an antara lain dinamai 'khair' (lihat misal QS 2:215), yang sejajar dengan makna 'baik' atau 'kebaikan'. Hal ini boleh jadi bermaksud bahwa perolehan, penggunaan, dan penyikapannya akan harta haruslah selalu dengan cara yang baik di sisinya.

Harta hanyalah titipan Gusti Allah. Hanya atas kehendakNya amanah itu diberikan dan diambillnya kembali dengan mudah. Dan karena itu titipan, maka kelak di hari akhir kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya.

Tak hanya bagi sikap pribadi, pelajaran dari Qarun dan Sulaiman A.S juga adalah bagaimana kita meneladani dua kisah ini dalam dimensi sosial misalnya terkait pengentasan kemiskinan dan membangun kesejahteraan sosial. Di lain kesempatan, mudah-mudahan kita masih diberi umur untuk mengulasnya. ■